**Contoh Ilustrasi Pelaporan Dampak Karhutla**

Contoh-contoh berikut menggunakan fakta, keadaan, asumsi, dan angka hipotetis untuk membantu pembaca memahami penerapan persyaratan yang relevan dalam SAK Indonesia dan SPK. Contoh-contoh ini tidak mencakup seluruh fakta dan keadaan yang mungkin dihadapi entitas serta tidak dimaksudkan untuk menetapkan persyaratan baru.

Kesimpulan dalam setiap contoh didasarkan pada pola fakta yang dijelaskan dan tidak serta-merta berlaku bagi entitas lain. Dalam menyusun laporan keuangan dan pengungkapan keberlanjutan, entitas perlu menggunakan pertimbangan berdasarkan fakta dan keadaannya sendiri, termasuk dalam menilai materialitas, serta menerapkan seluruh persyaratan yang relevan dalam standar yang berlaku.

---

**Contoh 1 – Kewajiban pemulihan dan risiko kebakaran berulang**

**Pola Fakta**

Pada tahun 20X1, terjadi kebakaran di wilayah operasi Entitas A. Setelah mempertimbangkan bukti yang tersedia dan nasihat hukum, entitas menyimpulkan bahwa kebakaran tersebut menimbulkan kewajiban kini untuk memulihkan lahan yang terdampak. Proses untuk menentukan jumlah akhir pengeluaran masih berlangsung. Entitas A mengelola perkebunan serta mengolah dan menjual produk pertanian dari perkebunannya dan dari pemasok pihak ketiga.

Pada akhir 20X1, entitas memperkirakan bahwa penyelesaian kewajiban tersebut kemungkinan besar memerlukan pengeluaran antara Rp18 miliar dan Rp26 miliar. Dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan hasil, entitas menentukan bahwa **Rp22 miliar** merupakan estimasi terbaik atas pengeluaran untuk menyelesaikan kewajiban pada tanggal pelaporan.

Entitas juga mengidentifikasi risiko kebakaran berulang yang diperkirakan secara wajar dapat memengaruhi prospeknya, termasuk melalui gangguan operasi, biaya pemulihan, dan perubahan akses terhadap pendanaan. Dalam ilustrasi ini, entitas menyimpulkan bahwa sebagian risiko tersebut merupakan risiko terkait iklim, antara lain karena kondisi panas dan kering yang dapat meningkatkan kerentanan wilayah operasinya terhadap kebakaran.

Dalam mengidentifikasi risiko dan peluang terkait keberlanjutan yang dapat memengaruhi prospeknya, Entitas A menelaah topik pengungkapan dalam SASB Standards yang relevan dengan kegiatan usahanya dan mempertimbangkan keterterapannya sesuai PSPK 1. Berdasarkan kegiatan pengolahan dan penjualan produk pertaniannya, Entitas A mempertimbangkan SASB Standard untuk industri *agricultural products*. Apabila kegiatan entitas juga berkaitan dengan industri lain, entitas mempertimbangkan panduan yang relevan untuk kegiatan tersebut.

Penelaahan tersebut membantu manajemen mempertimbangkan risiko yang terkait dengan kegiatan usaha dan rantai pasoknya. Entitas juga mempertimbangkan informasi lain yang relevan dengan fakta dan keadaannya, termasuk penggunaan dan pengelolaan lahan serta hubungannya dengan masyarakat. Entitas kemudian menggunakan pertimbangannya untuk menentukan risiko, peluang, dan informasi yang material, termasuk informasi tentang risiko kebakaran yang dibahas dalam contoh ini.

Untuk risiko terkait iklim yang diidentifikasi, entitas juga mempertimbangkan panduan berbasis industri yang relevan dalam menerapkan PSPK 2, sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Metrik dan target dalam contoh ini merupakan ilustrasi berdasarkan fakta Entitas A; metrik dan target tersebut tidak dimaksudkan sebagai kutipan atau daftar metrik yang diwajibkan oleh SASB Standards.

| Laporan Keuangan | Pengungkapan Keberlanjutan |
|---|---|
| Sesuai PSAK 237, entitas menilai apakah terdapat kewajiban kini akibat peristiwa masa lalu, apakah kemungkinan besar diperlukan arus keluar sumber daya untuk menyelesaikannya, dan apakah jumlah kewajiban dapat diestimasi secara andal.<br><br>Dalam ilustrasi ini, ketiga kriteria tersebut terpenuhi. Oleh karena itu, entitas mengakui **provisi sebesar Rp22 miliar** pada akhir 20X1. Jumlah yang diakui didasarkan pada estimasi terbaik sesuai PSAK 237 dan dapat berubah pada periode berikutnya ketika informasi baru tersedia. Perlakuan atas sisi lain pengakuan provisi ditentukan berdasarkan fakta dan persyaratan SAK yang relevan.<br><br>Entitas mengungkapkan informasi yang disyaratkan, termasuk sifat kewajiban, perkiraan waktu penyelesaian, serta ketidakpastian mengenai jumlah atau waktu pengeluaran. Tuntutan hukum atau terjadinya kebakaran tidak otomatis menghasilkan provisi: kesimpulan bergantung pada penilaian fakta dan pemenuhan kriteria pengakuan. Jika provisi tidak diakui, entitas tetap mempertimbangkan apakah terdapat | Selain informasi dalam laporan keuangan, Entitas A menjelaskan risiko kebakaran berulang, cara entitas mengelolanya, serta dampaknya terhadap kegiatan usaha dan prospek keuangan. Misalnya, pengungkapan yang material dapat mencakup hal-hal berikut.<br><br>**Dampak keuangan kini**<br>Entitas menjelaskan hubungan antara kebakaran yang terjadi, kewajiban pemulihan, dan provisi sebesar **Rp22 miliar** yang diakui dalam laporan keuangan 20X1. Entitas merujuk pada catatan laporan keuangan yang relevan dan menjelaskan ketidakpastian yang memengaruhi estimasi.<br><br>**Strategi dan sumber daya**<br>Untuk mengurangi risiko kebakaran berulang, manajemen merencanakan pemantauan titik panas, patroli di area rawan, pelatihan pekerja dan pemasok, serta penguatan prosedur penanganan dini bersama pihak terkait. Pada akhir 20X1, manajemen telah menyetujui anggaran sebesar **Rp15 miliar** untuk program pencegahan selama 20X2–20X4, yang direncanakan didanai dari kas operasi. |

| Laporan Keuangan | Pengungkapan Keberlanjutan |
|---|---|
| liabilitas kontinjensi yang perlu diungkapkan. | Entitas menjelaskan tindakan yang telah dilaksanakan, tindakan yang masih direncanakan, serta kemajuan dibandingkan dengan rencana sebelumnya. Anggaran pencegahan tersebut terpisah dari estimasi Rp22 miliar untuk menyelesaikan kewajiban pemulihan yang telah ada dan tidak otomatis menjadi liabilitas pada akhir 20X1.<br><br>**Dampak keuangan yang diantisipasi**<br>Berdasarkan rencana pada akhir 20X1, entitas memperkirakan:<br>• pengeluaran untuk menyelesaikan kewajiban pemulihan sebesar **Rp22 miliar**, dengan pelaksanaan yang diperkirakan terutama pada 20X2–20X3; dan<br>• pengeluaran program pencegahan sebesar **Rp6 miliar pada 20X2, Rp5 miliar pada 20X3, dan Rp4 miliar pada 20X4**.<br><br>Entitas menjelaskan asumsi dan ketidakpastian yang memengaruhi waktu serta jumlah pengeluaran, termasuk kemungkinan bahwa biaya pemulihan aktual berbeda dari estimasi. Entitas juga menjelaskan bagaimana pengeluaran tersebut dipertimbangkan dalam rencana pendanaan dan arus kasnya.<br><br>**Metrik dan target**<br>Entitas menggunakan persentase area operasional berisiko tinggi yang tercakup dalam pemantauan dan patroli sebagai salah satu metrik pengelolaan risiko. Misalnya, cakupannya adalah **60% pada akhir 20X1** dan entitas telah menetapkan target internal untuk mencapai **90% pada akhir 20X4**. Entitas menjelaskan cara menentukan area berisiko tinggi, metode pengukuran, tindakan untuk mencapai |

| Laporan Keuangan | Pengungkapan Keberlanjutan |
|---|---|
| | target, serta kemajuan aktual setiap periode.<br><br>Entitas juga dapat menjelaskan metrik lain yang digunakannya, seperti luas area yang terbakar, jumlah kejadian kebakaran, atau waktu respons. Cakupan pemantauan yang lebih tinggi saja tidak membuktikan bahwa seluruh kebakaran telah dicegah; hasilnya perlu dibaca bersama metrik dan penjelasan lain yang relevan. |

**Keterhubungan informasi**
Provisi sebesar **Rp22 miliar** dalam laporan keuangan berkaitan dengan kewajiban kini yang timbul dari kebakaran pada 20X1. Pengungkapan keberlanjutan menjelaskan kewajiban tersebut dalam konteks risiko, strategi pencegahan, serta dampak keuangan yang diantisipasi. Rencana pencegahan sebesar **Rp15 miliar** berkaitan dengan tindakan masa depan dan dinilai secara terpisah dari kewajiban yang telah diakui.

---

**Contoh 2 – Gangguan operasi dan penurunan nilai aset**

**Pola Fakta**
Asap tebal akibat karhutla menyebabkan Entitas B menghentikan sementara kegiatan sebuah fasilitas produksi selama 20 hari pada tahun 20X1. Penghentian tersebut mengganggu pengiriman produk kepada pelanggan dan menyebabkan entitas menggunakan jalur distribusi alternatif.

Selama tahun 20X1, entitas mencatat pendapatan sebesar Rp180 miliar, dibandingkan dengan Rp200 miliar pada tahun sebelumnya. Manajemen memperkirakan bahwa sebagian penurunan tersebut berkaitan dengan gangguan operasional akibat asap, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain, termasuk perubahan permintaan pelanggan. Entitas juga mengeluarkan biaya tambahan sebesar Rp5 miliar untuk perlindungan pekerja dan distribusi alternatif.

Manajemen menilai bahwa gangguan serupa dapat terjadi kembali dan memengaruhi arus kas masa depan fasilitas. Dalam ilustrasi ini, entitas menyimpulkan bahwa risiko tersebut merupakan risiko terkait iklim yang diperkirakan secara wajar dapat memengaruhi prospeknya. Kesimpulan ini didasarkan pada fakta dan keadaan Entitas B, dan tidak berarti bahwa setiap risiko akibat karhutla secara otomatis merupakan risiko terkait iklim.

| Laporan Keuangan | Pengungkapan Keberlanjutan |
|---|---|
| Entitas mencatat pendapatan dan beban berdasarkan transaksi yang terjadi selama periode pelaporan, sesuai dengan persyaratan SAK yang relevan. Tambahan biaya sebesar Rp5 miliar memengaruhi laba rugi tahun 20X1. Penurunan pendapatan sebesar Rp20 miliar dibandingkan dengan tahun sebelumnya terlihat dalam kinerja periode berjalan, tetapi tidak seluruhnya disebabkan oleh karhutla.<br><br>Gangguan operasi dan perkiraan arus kas yang lebih rendah juga merupakan indikasi bahwa aset fasilitas mungkin mengalami penurunan nilai. Entitas mengestimasi jumlah terpulihkan unit penghasil kas yang mencakup fasilitas tersebut sesuai PSAK 236.<br><br>Misalnya, pada akhir tahun 20X1:<br>• jumlah tercatat unit penghasil kas sebelum penurunan nilai adalah **Rp100 miliar**;<br>• jumlah terpulihkannya adalah **Rp80 miliar**; dan<br>• entitas mengakui **kerugian penurunan nilai sebesar Rp20 miliar**, sesuai persyaratan PSAK 236.<br><br>Entitas mempertimbangkan pengungkapan yang disyaratkan dan informasi material lainnya, termasuk asumsi utama dan ketidakpastian yang relevan dalam menentukan jumlah terpulihkan. Jika jumlah terpulihkan tidak lebih rendah daripada jumlah tercatat, entitas tidak mengakui kerugian penurunan nilai. Meskipun demikian, penjelasan mengenai pertimbangan manajemen tetap dapat menjadi informasi material. | Selain informasi dalam laporan keuangan, Entitas B menjelaskan bagaimana risiko terkait iklim tersebut memengaruhi kegiatan usaha dan prospeknya, serta bagaimana entitas meresponsnya. Misalnya, pengungkapan yang material dapat mencakup hal-hal berikut.<br><br>**Dampak keuangan kini**<br>Entitas menjelaskan bahwa penghentian operasional selama 20 hari menyebabkan gangguan pengiriman dan tambahan biaya sebesar **Rp5 miliar**. Entitas menghubungkan risiko tersebut dengan pengujian yang menghasilkan kerugian penurunan nilai sebesar **Rp20 miliar**, serta merujuk pada catatan laporan keuangan yang relevan.<br><br>Entitas juga menjelaskan bahwa pendapatan turun dari **Rp200 miliar menjadi Rp180 miliar**, tetapi tidak menyatakan seluruh penurunan sebesar Rp20 miliar tersebut sebagai dampak karhutla karena perubahan permintaan turut berpengaruh. Jika dampak karhutla tidak dapat dipisahkan secara andal dari faktor lain, entitas menjelaskan keterbatasan tersebut.<br><br>**Strategi dan sumber daya**<br>Untuk mengurangi gangguan di masa depan, manajemen merencanakan peningkatan penyaringan udara, penyesuaian prosedur keselamatan pekerja, dan penggunaan fasilitas distribusi alternatif. Misalnya, pada akhir 20X1 manajemen telah menyetujui anggaran sebesar **Rp12 miliar** untuk program tersebut selama 20X2–20X3, yang direncanakan didanai dari kas operasi. Entitas menjelaskan status persetujuan, waktu pelaksanaan, dan |

| Laporan Keuangan | Pengungkapan Keberlanjutan |
|---|---|
| | kemajuan aktualnya. Anggaran ini tidak otomatis menjadi liabilitas dalam laporan keuangan tahun 20X1.<br><br>**Dampak keuangan yang diantisipasi**<br>Berdasarkan informasi dan asumsi yang digunakan dalam perencanaan pada akhir 20X1, entitas memperkirakan bahwa:<br>• program yang disetujui akan memerlukan pengeluaran sekitar **Rp7 miliar pada 20X2** dan **Rp5 miliar pada 20X3**; dan<br>• setelah program berjalan, biaya tambahan akibat gangguan asap diperkirakan berkisar antara **Rp1 miliar dan Rp3 miliar per tahun** selama 20X3–20X5, bergantung pada frekuensi dan tingkat keparahan gangguan.<br><br>Entitas menjelaskan asumsi penting, sumber ketidakpastian, dan bagaimana perkiraan tersebut berkaitan dengan rencana keuangannya. Angka yang diantisipasi bukan kepastian atau jumlah yang otomatis diakui dalam laporan keuangan 20X1. Perkiraan biaya Rp1 miliar–Rp3 miliar tersebut juga tidak mencakup anggaran program Rp12 miliar, sehingga pengguna dapat memahami kedua jumlah secara terpisah.<br><br>**Metrik dan target**<br>Entitas menggunakan jumlah hari penghentian operasional akibat asap sebagai salah satu metrik untuk memantau risiko. Misalnya, setelah mencatat **20 hari pada 20X1**, entitas menetapkan target internal untuk mengurangi jumlah tersebut menjadi **tidak lebih dari 10 hari per tahun pada 20X5**. Entitas menjelaskan cara pengukuran, tindakan yang mendukung target, kemajuan aktual, dan faktor di luar |

| Laporan Keuangan | Pengungkapan Keberlanjutan |
|---|---|
| | kendalinya, seperti tingkat keparahan asap. |

**Keterhubungan informasi**

Laporan keuangan menunjukkan tambahan beban dan penurunan nilai yang memenuhi persyaratan pengakuan pada tahun 20X1. Pengungkapan keberlanjutan menjelaskan bagaimana risiko yang sama memengaruhi operasi, strategi, dan perkiraan keuangan pada masa depan. Entitas menggunakan data dan asumsi yang konsisten sejauh dimungkinkan oleh persyaratan yang berlaku, serta menjelaskan perbedaan yang relevan.

***